ISLAM DALAM PARADIGMA TATA KELOLA SOSIAL PRA-NEGARA DAN KONSEP DINASTI KEKUASAAN

Aristokrasi dan Kepemimpinan Kenabian: Transformasi Aristokrasi yang Berdialektika melalui Pengalaman Konflik, dari Hijrah ke Madinah hingga Kristalisasi Dinasti Umayyah

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.

Peneliti Independen

Bandar Lampung, Indonesia

2026

ABSTRAK

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa kepemimpinan kenabian Muhammad ﷺ tidak dapat dipahami sebagai varian lain dari aristokrasi qabilah Arab yang sudah ada, namun juga tidak dapat dipahami sebagai penghapusan total dan permanen atas logika aristokratik tersebut. Sebaliknya, yang terjadi adalah transformasi yang berdialektika melalui pengalaman konflik: kepemimpinan kenabian hadir sebagai antitesis langsung terhadap aristokrasi qabilah Quraisy di Mekkah, dipaksa oleh tekanan konflik untuk berpindah medan melalui Hijrah ke Madinah, dan dalam medan baru tersebut menghasilkan sintesis konkret berupa Piagam Madinah dan Ukhuwah Anshar-Muhajirin yang mendialektikakan, bukan sekadar menghapuskan, struktur qabilah yang sudah mengakar. Dialektika ini tidak berhenti pada sintesis yang stabil, melainkan terus bergerak melalui tegangan yang mulai tampak pada era Khulafa ar-Rasyidin, hingga akhirnya mengkristal kembali menjadi bentuk aristokratik baru pada awal Dinasti Umayyah, ditandai oleh suksesi dinastik Yazid bin Muawiyah dan pergeseran dari prinsip khilafah menuju mulk. Tulisan ini menyimpulkan bahwa tegangan antara otoritas kenabian-transenden dan otoritas darah-keturunan merupakan siklus yang tidak pernah terselesaikan secara final, melainkan terus dinegosiasikan ulang sepanjang sejarah politik Islam berikutnya.

Kata Kunci: aristokrasi qabilah, kepemimpinan kenabian, Piagam Madinah, ukhuwah Anshar-Muhajirin, Khulafa ar-Rasyidin, Dinasti Umayyah, khilafah dan mulk

DAFTAR ISI

ABSTRAK **1**
DAFTAR ISI **2**
BAB I — PENDAHULUAN **3**
BAB II — TATA KELOLA SOSIAL PRA-NEGARA ARAB: ARISTOKRASI QABILAH SEBELUM ISLAM **4**
2.1 Struktur Sosial Mekkah Pra-Islam: Qabilah sebagai Unit Dasar Kekuasaan 4
2.2 Logika Legitimasi Aristokratik: Nasab, Kekayaan, dan Kontrol Ka'bah 4
2.3 Tidak Ada Negara, namun Ada Hierarki: Pra-Negara yang Tetap Aristokratik 4
BAB III — KENABIAN SEBAGAI ANTITESIS: OTORITAS WAHYU VERSUS OTORITAS DARAH **6**
3.1 Posisi Sosial Muhammad ﷺ Sebelum Kenabian: Di Dalam, namun Tidak di Puncak, Struktur Aristokratik 6
3.2 Klaim Nubuwwah sebagai Tantangan Langsung terhadap Logika Aristokratik 6
3.3 Sahabat-Sahabat Awal: Siapa yang Direkrut oleh Antitesis Ini? 6
BAB IV — HIJRAH SEBAGAI TITIK DIALEKTIS: KONFLIK YANG MEMAKSA TRANSFORMASI **8**
4.1 Mekkah sebagai Medan Tertutup: Mengapa Antitesis Tidak Bisa Menang di Tempatnya Sendiri 8
4.2 Hijrah sebagai Pemindahan Medan Dialektika, Bukan Sekadar Pelarian 8
4.3 Mengapa Madinah Mengundang, Bukan Hanya Menerima 8
BAB V — PIAGAM MADINAH: KONTRAK SOSIAL YANG MENDIALEKTIKAKAN QABILAH **10**
5.1 Piagam Madinah sebagai Dokumen Sintesis, Bukan Penghapusan 10
5.2 Pergeseran Basis Legitimasi: Dari Nasab ke Kontrak 10
5.3 Batas-Batas Dialektika: Apa yang Tidak Berubah 10
BAB VI — UKHUWAH ANSHAR-MUHAJIRIN: ARISTOKRASI NASAB DIGANTIKAN ARISTOKRASI IMAN? **12**
6.1 Ukhuwah sebagai Rekayasa Sosial yang Disengaja 12
6.2 Fungsi Struktural Ukhuwah: Meruntuhkan Monopoli Sumber Daya Berbasis Klan 12
6.3 Pertanyaan Kritis: Munculnya Hierarki Baru Berbasis Kedekatan? 12
BAB VII — KHULAFA AR-RASYIDIN: SINTESIS YANG BELUM STABIL **14**
7.1 Suksesi Abu Bakar: Konsensus yang Menghindari Klaim Aristokratik Murni 14
7.2 Tegangan yang Mulai Tampak: Quraisy sebagai Prasyarat Tak Terucap 14
7.3 Fitnah Kubra: Ketika Sintesis Mulai Retak 14
BAB VIII — DINASTI UMAYYAH: KRISTALISASI ARISTOKRASI YANG KEMBALI **16**
8.1 Muawiyah dan Restorasi Logika Aristokratik-Kesukuan 16
8.2 Suksesi Yazid: Kembalinya Prinsip Nasab Sebagai Basis Tunggal 16
8.3 Dari Khilafah ke Mulk: Kesadaran Para Pelaku Sejarah Sendiri 16
BAB IX — PENUTUP: DIALEKTIKA YANG TIDAK SELESAI **18**
DAFTAR PUSTAKA **19**

BAB I — PENDAHULUAN

Kepemimpinan dalam sejarah peradaban manusia, sejak masa pra-negara hingga terbentuknya negara formal, hampir selalu bertumpu pada satu dari sedikit logika legitimasi: kekuatan militer, kekayaan ekonomi, garis keturunan (nasab), atau klaim atas otoritas transenden. Aristokrasi, sebagai model tata kelola yang meletakkan kekuasaan pada segelintir elite berdasarkan garis darah dan status sosial yang diwariskan, merupakan salah satu bentuk paling purba dan paling tahan lama dari logika tersebut — ia ditemukan di hampir setiap peradaban pra-modern, termasuk dalam struktur sosial Arab pra-Islam yang menjadi konteks langsung kelahiran dakwah Muhammad ﷺ.

Tulisan ini mengajukan tesis bahwa kepemimpinan kenabian Muhammad ﷺ tidak dapat dipahami sebagai sekadar varian lain dari aristokrasi Arab yang sudah ada, namun juga tidak dapat dipahami sebagai penghapusan total dan permanen atas logika aristokratik tersebut. Sebaliknya, yang terjadi adalah sebuah **transformasi yang berdialektika melalui pengalaman konflik**: kepemimpinan kenabian, yang pada mulanya hadir sebagai antitesis langsung terhadap aristokrasi qabilah Quraisy, dipaksa oleh tekanan konflik di Mekkah untuk berpindah medan (Hijrah), dan dalam medan baru tersebut (Madinah) menghasilkan sintesis-sintesis konkret — Piagam Madinah dan Ukhuwah Anshar-Muhajirin — yang secara cermat mendialektikakan, bukan sekadar menghapuskan, struktur qabilah yang sudah mengakar. Dialektika ini, sebagaimana akan ditunjukkan, tidak berhenti pada sintesis yang stabil dan permanen, melainkan terus bergerak hingga akhirnya mengkristal kembali menjadi bentuk aristokratik baru pada awal Dinasti Umayyah — sebuah siklus tarik-menarik antara otoritas kenabian-transenden dan otoritas darah-keturunan yang tidak pernah benar-benar terselesaikan secara final.

Untuk membangun argumen ini, tulisan ini menelusuri tata kelola sosial pra-negara Arab sebelum Islam sebagai titik berangkat (tesis aristokratik awal), dakwah kenabian Mekkah sebagai antitesis langsungnya, Hijrah sebagai titik dialektis yang memaksa pertemuan kedua kutub tersebut, Piagam Madinah dan Ukhuwah Anshar-Muhajirin sebagai sintesis konkretnya, kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin sebagai sintesis yang belum stabil, dan kebangkitan Dinasti Umayyah sebagai kristalisasi kembali unsur aristokratik dalam wajah baru.

BAB II — TATA KELOLA SOSIAL PRA-NEGARA ARAB: ARISTOKRASI QABILAH SEBELUM ISLAM

2.1 Struktur Sosial Mekkah Pra-Islam: Qabilah sebagai Unit Dasar Kekuasaan

Jazirah Arab pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi belum mengenal struktur negara (state) dalam pengertian modern — tidak ada birokrasi terpusat, tidak ada monopoli kekerasan oleh satu otoritas tunggal, dan tidak ada teritorial yang dikelola melalui institusi formal yang permanen. Tata kelola sosial yang berlaku adalah tata kelola pra-negara berbasis qabilah (suku/klan): unit sosial-politik dasar yang mengikat individu melalui garis keturunan (nasab) dan kewajiban timbal-balik perlindungan serta solidaritas (yang dalam kerangka Ibn Khaldun kemudian dikonsep sebagai 'ashabiyyah).

Kekuasaan dalam struktur qabilah ini bersifat aristokratik dalam pengertian klasik: ia dipegang oleh para pemuka klan (sayyid, syaikh) yang posisinya ditentukan oleh kombinasi garis keturunan terhormat, kekayaan, jumlah pengikut, dan reputasi kehormatan (sharaf) yang diwariskan dan diperkuat secara antar-generasi. Mekkah, sebagai pusat perdagangan dan situs Ka'bah, dikuasai oleh klan Quraisy yang dalam dirinya sendiri terbagi ke dalam sub-klan dengan hierarki status yang kompleks — Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Makhzum, dan lain-lain — masing-masing bersaing memperebutkan pengaruh ekonomi dan religius-simbolik di sekitar Ka'bah.

2.2 Logika Legitimasi Aristokratik: Nasab, Kekayaan, dan Kontrol Ka'bah

Legitimasi kepemimpinan dalam tata kelola pra-Islam ini bertumpu pada tiga pilar yang saling menguatkan: pertama, kemurnian dan ketinggian garis keturunan (nasab) yang dapat ditelusuri ke leluhur yang dihormati; kedua, kekayaan material yang diperoleh terutama dari perdagangan kafilah lintas-jazirah; ketiga, kontrol atas situs-situs religius-simbolik, terutama Ka'bah, yang memberikan posisi istimewa Quraisy sebagai penjaga (hijabah) dan penyedia layanan bagi peziarah (siqayah, rifadah). Kombinasi ketiga pilar ini menghasilkan struktur yang secara fungsional aristokratik: kekuasaan terkonsentrasi pada elite klan tertentu, diwariskan secara antar-generasi, dan dilegitimasi melalui klaim keunggulan darah serta kontrol atas sumber daya ekonomi-simbolik yang langka.

2.3 Tidak Ada Negara, namun Ada Hierarki: Pra-Negara yang Tetap Aristokratik

Penting ditegaskan bahwa absennya negara formal di Mekkah pra-Islam tidak berarti absennya hierarki kekuasaan. Justru sebaliknya: dalam ketiadaan institusi negara yang dapat memonopoli kekerasan secara legal-rasional, logika aristokratik qabilah menjadi mekanisme pengganti yang

mengatur distribusi kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan sosial. Tata kelola pra-negara ini bersifat sangat stabil secara struktural karena ia diwariskan melalui ikatan darah yang tidak mudah digugat — seseorang yang lahir di luar klan terhormat secara struktural tertutup aksesnya pada posisi kepemimpinan, terlepas dari kapasitas moral atau intelektualnya secara individual.

BAB III — KENABIAN SEBAGAI ANTITESIS: OTORITAS WAHYU VERSUS OTORITAS DARAH

3.1 Posisi Sosial Muhammad ﷺ Sebelum Kenabian: Di Dalam, namun Tidak di Puncak, Struktur Aristokratik

Muhammad ﷺ lahir dari Bani Hashim, sub-klan Quraisy yang terhormat namun, pada masanya, tidak menempati posisi ekonomi-politik paling dominan dibandingkan sub-klan rival seperti Bani Umayyah atau Bani Makhzum. Posisi ini penting secara struktural: Muhammad ﷺ berada di dalam sistem aristokratik qabilah, namun tidak di puncaknya — sebuah posisi yang secara sosiologis memungkinkan munculnya kritik dari dalam terhadap sistem yang tidak sepenuhnya menguntungkannya secara pribadi, sekaligus memberinya kredibilitas dan jaringan untuk didengar oleh masyarakat Quraisy.

3.2 Klaim Nubuwwah sebagai Tantangan Langsung terhadap Logika Aristokratik

Yang membuat dakwah kenabian menjadi ancaman eksistensial bagi elite Quraisy bukanlah semata muatan teologisnya (penolakan terhadap politeisme), melainkan implikasi struktural dari klaim nubuwwah itu sendiri terhadap basis legitimasi aristokratik yang ada. Klaim kenabian mendasarkan otoritas bukan pada nasab, kekayaan, atau kontrol situs religius, melainkan pada pilihan ilahiah (ijtiba') yang secara prinsip dapat jatuh pada siapa pun, terlepas dari status sosial-ekonominya. Lebih jauh, ajaran tauhid yang dibawa secara langsung menggugat fungsi Ka'bah sebagai pusat pemujaan berhala yang menjadi salah satu pilar ekonomi-simbolik kekuasaan Quraisy — sebuah serangan langsung terhadap sumber daya material yang menopang aristokrasi qabilah Mekkah.

Penolakan keras elite Quraisy terhadap dakwah Muhammad ﷺ, dengan demikian, dapat dibaca bukan semata sebagai konservatisme teologis, melainkan sebagai respons defensif yang rasional terhadap ancaman struktural atas basis legitimasi kekuasaan mereka: jika otoritas dapat datang dari wahyu yang menjangkau siapa pun, dan jika berhala-berhala di Ka'bah yang menjadi sumber pendapatan ritual dianggap batil, maka pilar ganda aristokrasi Quraisy — nasab-istimewa dan kontrol-ekonomi-religius — runtuh secara bersamaan.

3.3 Sahabat-Sahabat Awal: Siapa yang Direkrut oleh Antitesis Ini?

Pola perekrutan pengikut awal Islam di Mekkah memperkuat pembacaan ini: proporsi signifikan dari sahabat-sahabat awal datang dari kalangan yang secara struktural berada di pinggiran atau di luar puncak hierarki aristokratik Quraisy — termasuk budak yang dimerdekakan (seperti Zaid bin

Haritsah dan Bilal bin Rabah), perempuan, kaum muda dari klan yang kurang dominan, serta sebagian kecil elite (seperti Abu Bakar dan Khalid bin Walid kemudian) yang bersedia melepaskan privilese struktural mereka. Pola rekrutmen ini menunjukkan bahwa nubuwwah, sebagai prinsip otoritas, secara material menarik justru mereka yang dirugikan oleh logika aristokratik yang ada — sebuah indikasi kuat bahwa antitesis ini bukan sekadar wacana teologis abstrak, melainkan tawaran struktural konkret bagi redistribusi otoritas sosial.

BAB IV — HIJRAH SEBAGAI TITIK DIALEKTIS: KONFLIK YANG MEMAKSA TRANSFORMASI

4.1 Mekkah sebagai Medan Tertutup: Mengapa Antitesis Tidak Bisa Menang di Tempatnya Sendiri

Selama tiga belas tahun dakwah di Mekkah, antitesis kenabian terhadap aristokrasi qabilah Quraisy tidak berhasil menghasilkan transformasi struktural — ia hanya menghasilkan konflik terbuka yang meningkat: pemboikotan ekonomi, persekusi fisik terhadap pengikut dari kalangan lemah, hingga ancaman pembunuhan terhadap Muhammad ﷺ sendiri. Kegagalan ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi struktural: Mekkah adalah medan di mana aristokrasi qabilah memegang kontrol penuh atas seluruh sumber daya — ekonomi, simbolik, dan koersif. Sebuah antitesis tidak dapat menghasilkan sintesis baru ketika tesis yang dilawannya masih memegang kendali mutlak atas medan tempat keduanya bertarung.

4.2 Hijrah sebagai Pemindahan Medan Dialektika, Bukan Sekadar Pelarian

Hijrah ke Madinah (Yatsrib) pada 622 M, dalam kerangka tulisan ini, dipahami bukan semata sebagai langkah defensif untuk menyelamatkan diri dari persekusi, melainkan sebagai pemindahan medan dialektika secara strategis ke ruang yang secara struktural lebih memungkinkan sintesis baru terjadi. Madinah, berbeda dari Mekkah, bukan medan yang dikuasai secara mutlak oleh satu struktur aristokratik tunggal: ia dihuni oleh dua suku Arab besar yang saling bersaing dan baru saja mengalami perang berkepanjangan (Aus dan Khazraj), ditambah tiga klan Yahudi (Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraizhah) dengan kepentingan dan aliansi masing-masing. Fragmentasi kekuasaan ini — ketidakberadaan satu aristokrasi tunggal yang dominan — justru menciptakan ruang kosong otoritas yang dapat diisi oleh prinsip kepemimpinan baru yang ditawarkan Muhammad ﷺ: bukan sebagai penambah satu lagi klan yang bersaing, melainkan sebagai penengah (hakim) yang posisinya secara tepat berasal dari ketidakterlibatannya dalam konflik internal Madinah yang sudah berlangsung lama.

4.3 Mengapa Madinah Mengundang, Bukan Hanya Menerima

Penting dicatat bahwa inisiatif undangan kepemimpinan ini datang dari penduduk Madinah sendiri (melalui perjanjian Aqabah pertama dan kedua), bukan dipaksakan oleh Muhammad ﷺ. Fakta ini memperkuat pembacaan dialektis: penduduk Madinah, yang berada dalam kebuntuan struktural akibat konflik antar-suku yang tak terselesaikan melalui logika aristokratik internal mereka sendiri, secara aktif mencari otoritas eksternal-penengah yang dapat melampaui klaim-klaim aristokratik

partikular yang saling bertentangan. Inilah prasyarat struktural yang memungkinkan sintesis: bukan otoritas yang dipaksakan dari luar terhadap aristokrasi yang masih kokoh (sebagaimana gagal terjadi di Mekkah), melainkan otoritas yang diundang masuk untuk mengisi kekosongan yang ditimbulkan oleh kegagalan aristokrasi qabilah lokal menyelesaikan konfliknya sendiri.

BAB V — PIAGAM MADINAH: KONTRAK SOSIAL YANG MENDIALEKTIKAKAN QABILAH

5.1 Piagam Madinah sebagai Dokumen Sintesis, Bukan Penghapusan

Piagam Madinah (Shahifat al-Madinah), yang disusun segera setelah Hijrah, merupakan artefak konkret dari proses dialektika yang dibahas tulisan ini. Yang membuat dokumen ini signifikan secara struktural bukanlah penghapusan total atas struktur qabilah yang ada, melainkan justru pengakuannya: piagam ini secara eksplisit menyebut dan mengakui keberadaan klan-klan Muhajirin (dari Quraisy) dan berbagai sub-klan Madinah (Aus, Khazraj, dan kelompok Yahudi) sebagai unit-unit yang tetap memiliki otonomi internal tertentu — termasuk dalam hal pembayaran tebusan darah (diyat) dan urusan internal klan masing-masing.

Namun di atas pengakuan ini, piagam meletakkan satu lapisan otoritas baru yang transenden-kontraktual: seluruh klan yang disebut terikat pada satu komunitas politik baru (ummah) yang memiliki kewajiban kolektif untuk pertahanan bersama, penyelesaian konflik melalui rujukan kepada Muhammad ﷺ sebagai otoritas penengah tertinggi, dan larangan bagi setiap klan untuk membuat perjanjian terpisah dengan pihak luar yang merugikan ummah secara kolektif. Inilah yang dimaksud dengan "mendialektikakan", bukan "menghapuskan": struktur qabilah dipertahankan sebagai unit fungsional di tingkat mikro, namun ditundukkan pada otoritas baru di tingkat makro yang basisnya bukan lagi nasab atau kekayaan, melainkan kenabian dan kontrak kolektif yang disepakati bersama.

5.2 Pergeseran Basis Legitimasi: Dari Nasab ke Kontrak

Piagam Madinah secara struktural menggeser basis legitimasi otoritas tertinggi dari logika aristokratik murni (nasab, kekayaan, kontrol situs religius) ke logika kontraktual: otoritas Muhammad ﷺ sebagai pemimpin Madinah bersumber dari kesepakatan tertulis yang ditandatangani (atau disetujui) oleh representasi berbagai klan, bukan dari klaim keturunan superior atas klan-klan tersebut. Ini adalah pergeseran yang secara konseptual radikal dalam konteks tata kelola pra-negara Arab: untuk pertama kalinya, otoritas kepemimpinan kolektif lintas-klan didasarkan pada kontrak yang dapat dirujuk teksnya, bukan pada hierarki darah yang taken-for-granted.

5.3 Batas-Batas Dialektika: Apa yang Tidak Berubah

Namun penting untuk tidak melebih-lebihkan derajat transformasi ini. Piagam Madinah tidak menghapuskan kepemilikan, kekayaan, atau struktur sosial internal klan — ia hanya menambahkan

lapisan otoritas baru di atasnya. Diyat (tebusan darah) tetap dibayarkan menurut garis klan; identitas dan loyalitas primer terhadap klan asal tidak serta-merta lenyap. Dialektika yang terjadi, dengan demikian, bersifat penundukan struktural (subordinasi qabilah pada ummah), bukan pembubaran total qabilah sebagai unit sosial. Watak dialektis inilah yang menjelaskan mengapa, sebagaimana akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, unsur aristokratik qabilah tidak benar-benar mati, melainkan tertidur secara struktural — menunggu momentum untuk kembali mengkristal.

BAB VI — UKHUWAH ANSHAR-MUHAJIRIN: ARISTOKRASI NASAB DIGANTIKAN ARISTOKRASI IMAN?

6.1 Ukhuwah sebagai Rekayasa Sosial yang Disengaja

Selain Piagam Madinah yang mengatur relasi antar-klan secara formal-kontraktual, Muhammad ﷺ juga menginisiasi instrumen sosial kedua yang bekerja pada level yang lebih intim: ukhuwah (persaudaraan) antara Muhajirin (pendatang dari Mekkah, yang kehilangan harta dan jaringan ekonomi-sosial mereka) dan Anshar (penduduk asli Madinah). Pasangan-pasangan persaudaraan ini secara sengaja dirancang untuk menggantikan fungsi ikatan nasab dengan ikatan iman: seorang Muhajir dan seorang Anshari yang sebelumnya tidak memiliki hubungan darah sama sekali diikat dalam relasi yang setara dengan — dan dalam beberapa riwayat, melampaui — relasi persaudaraan kandung, termasuk dalam hal pewarisan harta pada masa-masa awal sebelum diatur ulang oleh ayat-ayat warisan yang turun kemudian.

6.2 Fungsi Struktural Ukhuwah: Meruntuhkan Monopoli Sumber Daya Berbasis Klan

Secara fungsional, ukhuwah Anshar-Muhajirin menyelesaikan masalah struktural konkret yang muncul akibat Hijrah: Muhajirin tiba di Madinah dalam keadaan kehilangan basis ekonomi mereka (tanah, perdagangan, jaringan klan) yang sebelumnya menjadi sumber status sosial mereka di Mekkah. Tanpa ukhuwah, Muhajirin akan menjadi kelas bawah baru yang bergantung penuh pada belas kasihan klan-klan Madinah yang sudah mapan — sebuah resep bagi pembentukan hierarki aristokratik baru berbasis "pendatang vs pribumi". Ukhuwah secara eksplisit mencegah hal ini dengan memaksa redistribusi sumber daya (tempat tinggal, harta, bahkan dalam kasus tertentu mata pencaharian) melalui ikatan yang didasarkan bukan pada nasab atau senioritas klan, melainkan pada kesamaan status sebagai bagian dari ummah yang baru terbentuk.

6.3 Pertanyaan Kritis: Munculnya Hierarki Baru Berbasis Kedekatan?

Namun tulisan ini juga perlu mengajukan pertanyaan kritis yang tidak dapat dihindari: apakah ukhuwah dan struktur kepemimpinan awal Madinah benar-benar meniadakan logika hierarkis aristokratik, ataukah ia menciptakan bentuk hierarki baru yang basisnya bergeser dari nasab-darah menjadi kedekatan-historis dengan Nabi (qarabah ma'nawiyah)? Catatan historiografis menunjukkan bahwa as-Sabiqun al-Awwalun (mereka yang masuk Islam paling awal) dan ahlul Badr (peserta Perang Badar) memperoleh status sosial-politik istimewa yang kemudian menjadi rujukan legitimasi penting dalam suksesi kepemimpinan pasca-Nabi — sebuah indikasi bahwa "aristokrasi darah"

mungkin tidak hilang sepenuhnya, melainkan bertransformasi menjadi semacam "aristokrasi keutamaan-historis" (sabiqah) yang basisnya berbeda namun fungsinya secara struktural serupa: menentukan siapa yang memiliki klaim lebih kuat atas otoritas dan penghormatan kolektif.

Pertanyaan ini penting untuk menjaga kerangka dialektis tulisan tetap jujur secara analitis: dialektika antara kenabian dan aristokrasi tidak menghasilkan kemenangan telak salah satu pihak, melainkan sintesis yang dirinya sendiri mengandung tegangan internal yang belum terselesaikan — tegangan yang akan kembali muncul secara lebih terbuka pada periode suksesi pasca-Nabi.

BAB VII — KHULAFA AR-RASYIDIN: SINTESIS YANG BELUM STABIL

7.1 Suksesi Abu Bakar: Konsensus yang Menghindari Klaim Aristokratik Murni

Wafatnya Muhammad ﷺ pada 632 M menempatkan komunitas Muslim pada momen kritis pertama: tanpa otoritas wahyu yang hidup, basis legitimasi apa yang akan menggantikan otoritas kenabian? Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui proses musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah penting dicatat sebagai upaya eksplisit menghindari kembalinya logika aristokratik murni: Abu Bakar dipilih bukan karena ia keturunan langsung Muhammad ﷺ (yang secara biologis tidak memiliki keturunan laki-laki yang hidup) atau karena ia pemuka klan paling kaya, melainkan karena status sabiqah-nya sebagai sahabat tertua dan paling dipercaya — basis legitimasi yang, sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, sudah bergeser dari nasab-darah menuju keutamaan-historis dalam Islam.

7.2 Tegangan yang Mulai Tampak: Quraisy sebagai Prasyarat Tak Terucap

Namun di sisi lain, tulisan ini juga harus mencatat tegangan yang mulai tampak pada momen yang sama: argumen yang digunakan kelompok Muhajirin di Saqifah untuk menegaskan hak mereka atas khilafah, sebagaimana tercatat dalam riwayat-riwayat sejarah awal, turut menyertakan klaim keunggulan kesukuan Quraisy atas suku-suku Arab lainnya — sebuah residu logika aristokratik-kesukuan yang belum sepenuhnya tersublimasi oleh prinsip kenabian. Fakta bahwa seluruh empat Khalifah Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali) berasal dari Quraisy, meski dari sub-klan yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa identitas kesukuan-aristokratik tidak benar-benar lenyap sebagai prasyarat tak terucap bagi kelayakan memegang otoritas tertinggi, meskipun basis seleksi formal di antara Quraisy sendiri telah bergeser ke arah keutamaan dan konsensus.

7.3 Fitnah Kubra: Ketika Sintesis Mulai Retak

Pembunuhan Utsman bin Affan (656 M) dan perang saudara yang mengikutinya hingga pembunuhan Ali bin Abi Thalib (661 M) — periode yang dikenal sebagai Fitnah Kubra — dapat dibaca dalam kerangka tulisan ini sebagai momen ketika sintesis Madinah mulai retak secara terbuka. Konflik ini, pada level yang dalam, adalah konflik antara klaim legitimasi berbasis kedekatan-keturunan dengan Nabi (klaim Ali dan ahlul bait) melawan klaim legitimasi berbasis konsolidasi kekuasaan klan yang lebih besar dan lebih kaya (klan Bani Umayyah, melalui Muawiyah). Sintesis Madinah yang berhasil menahan kedua logika ini dalam keseimbangan rapuh selama periode

Khulafa ar-Rasyidin awal, mulai goyah ketika basis material-kesukuan (kekayaan, jaringan klan, kekuatan militer Suriah yang dikuasai Muawiyah) kembali menjadi penentu yang lebih kuat dibandingkan basis keutamaan-historis maupun kedekatan-nasab dengan Nabi.

BAB VIII — DINASTI UMAYYAH: KRISTALISASI ARISTOKRASI YANG KEMBALI

8.1 Muawiyah dan Restorasi Logika Aristokratik-Kesukuan

Naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pada 661 M, menyusul kesepakatan damai dengan Hasan bin Ali (Aam al-Jama'ah), menandai titik balik struktural yang menjadi puncak argumen tulisan ini: restorasi terbuka atas logika aristokratik-kesukuan yang sebelumnya berhasil ditundukkan, meski tidak sepenuhnya dihapuskan, oleh sintesis Madinah. Muawiyah berasal dari Bani Umayyah — sub-klan Quraisy yang secara historis menjadi rival utama Bani Hashim (klan Muhammad ﷺ) dan yang berada di pihak yang menentang dakwah kenabian paling lama dan paling keras di Mekkah sebelum akhirnya masuk Islam.

8.2 Suksesi Yazid: Kembalinya Prinsip Nasab Sebagai Basis Tunggal

Yang menjadikan momen ini benar-benar sebagai kristalisasi kembali aristokrasi, bukan sekadar pergantian kekuasaan biasa, adalah keputusan Muawiyah menunjuk anaknya sendiri, Yazid bin Muawiyah, sebagai penerus (waliyul ahdi) sebelum kematiannya pada 680 M. Keputusan ini secara struktural mengubah prinsip suksesi dari konsensus-keutamaan (sebagaimana berlaku, meski dengan tegangan, pada era Khulafa ar-Rasyidin) menjadi pewarisan dinastik berbasis garis keturunan langsung (nasab) dalam satu keluarga — sebuah pembentukan dinasti (Bani Umayyah) dalam pengertian paling literal: kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu garis darah, persis logika aristokratik yang pada mulanya ditantang langsung oleh klaim nubuwwah di Mekkah.

Penolakan signifikan terhadap suksesi Yazid — yang berujung pada Tragedi Karbala (680 M) dengan terbunuhnya Husain bin Ali — dapat dibaca sebagai manifestasi kekerasan dari tegangan dialektis yang telah dibahas sepanjang tulisan ini: perlawanan terakhir dari prinsip legitimasi berbasis kedekatan-nasab-dengan-Nabi dan keutamaan-historis melawan prinsip legitimasi berbasis konsolidasi kekuasaan-dinastik yang kini telah menang secara material dan militer.

8.3 Dari Khilafah ke Mulk: Kesadaran Para Pelaku Sejarah Sendiri

Menarik dicatat bahwa transisi ini disadari secara eksplisit oleh para pelaku dan pengamat sejarah pada masanya sendiri, yang membedakan antara khilafah (kepemimpinan yang berbasis konsensus dan prinsip-prinsip kenabian) dengan mulk (kerajaan/dinasti yang berbasis kekuasaan dan pewarisan darah) — sebuah pembedaan yang kemudian dirumuskan secara lebih sistematis-teoretis oleh pemikir seperti Ibn Khaldun pada abad-abad berikutnya. Bahwa pembedaan ini sudah muncul dalam

kesadaran kontemporer peristiwa itu sendiri menunjukkan bahwa kristalisasi aristokratik ini bukan semata pembacaan retrospektif tulisan ini, melainkan transformasi struktural yang dialami dan diberi nama secara sadar oleh generasi yang menyaksikannya langsung.

BAB IX — PENUTUP: DIALEKTIKA YANG TIDAK SELESAI

Tulisan ini telah menelusuri perjalanan dialektis antara dua logika otoritas yang secara fundamental berbeda — kepemimpinan kenabian yang berbasis pilihan ilahiah dan keutamaan moral-historis, melawan aristokrasi qabilah yang berbasis nasab, kekayaan, dan kontrol sumber daya material-simbolik — sejak tata kelola sosial pra-negara Arab pra-Islam, melalui konfrontasi terbuka di Mekkah, pemindahan medan dialektika melalui Hijrah, sintesis konkret dalam Piagam Madinah dan Ukhuwah Anshar-Muhajirin, tegangan yang mulai tampak pada era Khulafa ar-Rasyidin, hingga kristalisasi kembali logika aristokratik dalam bentuk Dinasti Umayyah.

Pola yang ditemukan menunjukkan bahwa dialektika ini tidak pernah menghasilkan kemenangan permanen dan final bagi salah satu kutub. Kenabian, sebagai antitesis terhadap aristokrasi, berhasil menghasilkan sintesis struktural yang nyata dan transformatif di Madinah — pergeseran basis legitimasi dari nasab ke kontrak dan keutamaan, redistribusi sumber daya lintas-klan melalui ukhuwah, penundukan struktur qabilah pada otoritas ummah yang lebih tinggi. Namun sintesis ini tidak menghapuskan logika aristokratik secara permanen, melainkan menundukkannya untuk sementara — dan ketika basis material-kesukuan kembali terkonsolidasi secara kuat (sebagaimana terjadi pada Bani Umayyah pasca-Fitnah Kubra), logika aristokratik mengkristal kembali dalam bentuk dinasti formal, lengkap dengan prinsip pewarisan kekuasaan berbasis darah yang pada awalnya secara langsung ditantang oleh klaim nubuwwah itu sendiri.

Implikasi dari pembacaan dialektis ini penting bagi pemahaman sejarah politik Islam secara lebih luas: ia menunjukkan bahwa pertanyaan tentang basis legitimasi kekuasaan — wahyu-keutamaan versus darah-kekuasaan — bukanlah pertanyaan yang terselesaikan sekali untuk selamanya pada masa kenabian, melainkan tegangan struktural yang terus-menerus dinegosiasikan ulang sepanjang sejarah politik Islam berikutnya, dari periode Umayyah, Abbasiyah, hingga kesultanan-kesultanan yang muncul jauh setelahnya — masing-masing dengan kombinasi dan keseimbangannya sendiri antara dua logika otoritas yang sejak awal tidak pernah benar-benar terpisahkan secara tuntas.

Wallahu a'lam bishawab.

DAFTAR PUSTAKA

Constitution of Medina. (2026, April 15). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Medina

Embong, Z. (2018). Conflict management in the Constitution of Medina: An analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8*(12). https://hrmars.com/papers_submitted/5041/Conflict_Management_in_the_Constitution_of_Medina_An_Analysis.pdf

Ibn Khaldun. (2015). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Trans., abridged N. J. Dawood, Ed.). Princeton University Press. (Karya asli ditulis 1377 M)

Islamic Civilization. (2026, March 5). *Governing structures in pre-Islamic Arabia*. https://islamciv.com/2025/07/12/governing-structures-in-pre-islamic-arabia/

Kennedy, H. (2004). *The prophet and the age of the caliphates: The Islamic Near East from the sixth to the eleventh century* (2nd ed.). Longman.

Khan, S. M. (2020, June 26). *First Fitna*. World History Encyclopedia. https://www.worldhistory.org/First_Fitna/

Pre-Islamic Arabia. (2026, June 26). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Islamic_Arabia

Quraysh. (2026, June 19). In *Wikipedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Quraysh

Wensinck, A. J. (2024, July 22). *The "Constitution" of Medina: Translation, commentary, and meaning today*. Yaqeen Institute. https://yaqeeninstitute.org/read/paper/the-constitution-of-medina-translation-commentary-and-meaning-today

Wikishia contributors. (n.d.). *Pact of brotherhood*. WikiShia. https://en.wikishia.net/view/Pact_of_Brotherhood